

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 2008 -2014
TERHADAP PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA
SESUAI DENGAN PP NO.129 TAHUN 2000**

Zafar Siddik Pohan

Abstract

North Labuhanbatu District Government is the result rather than the division that Labuhanbatu District in 2008. The division is an implementation of the Act 32 of 2004 set forth therein are the values of the people's welfare. Acceleration of development in Indonesia has been dimuai since the old order up until this reform era. Basically, the result of the division itself produce income for each area in the extract to be more independent and established and evolving as tembu which are contained in the regional autonomy law No. 129/2000 Accelerating the Implementation of the Regional Economic Development, Management Acceleration Potential Areas, Improved Human Resources (HDI), Improvement of infrastructure facilities, etc. As the aim of achieving social welfare improvement. In accordance with the mandate of Regulation No. 6 of 2008 explained that the need for an evaluation of the impact of the expansion itself.

The researchers themselves have a clear goal to learn in depth how the actual impact on the community division Labuthanbatu Regency Regency North Labuhanbatu carefully can see the development of existing development in the rapidly growing district of North Labuhanbatu.

Researchers use impact evaluation analysis method descriptions or interviews in the form of questions to the informant related to the impact of the expansion in the district of North Labuhanbatu and then presents the results of research. Results of research conducted to increase the quality in the district of North Labuhanbatu to the development of good growing development in several sectors such as education sector, economic growth, human growth index sector in a sustainable manner. This can be seen from the results of research in which people who live in the District of North Labuhanbatu feel a good service and access to the construction of more touching than before the expansion.

Keywords: Decentralization, Autonomy, Impact Evaluation

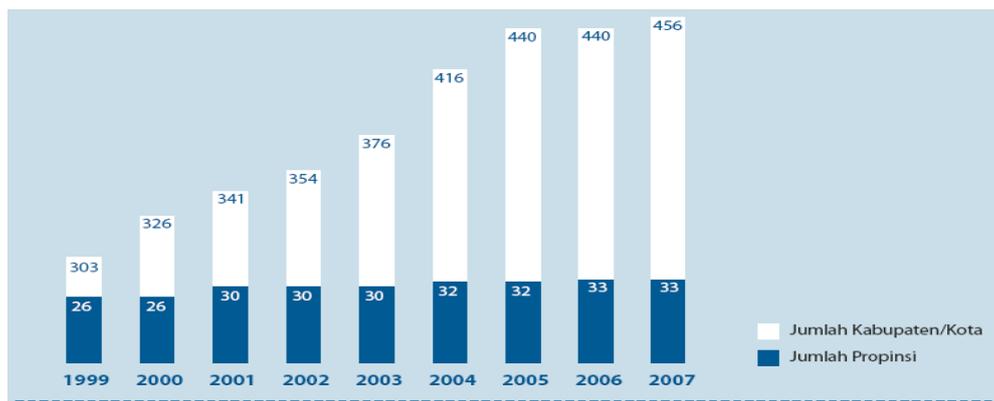
1. Pendahuluan

Pemekaran merupakan bagian dari penguatan ketahanan nasional, yang di implementasikan melalui pelaksanaan otonomi daerah sebagai amanat UU secara konstitusional maupun legal diarahkan sebagai akselerasi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sebagaimana digariskan dalam Penjelasan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa melalui otonomi luas mengandung beberapa prinsip kebijakan pemekaran dalam aturannya perlu diketahui yaitu; *pertama*, tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan daerah daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, dan peningkatan hubungan antara

pemerintah pusat dan daerah. *Kedua*, syarat pembentukan daerah dan criteria pemekaran daerah adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin terselenggaranya otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tri Ratnawati, 2009: 23-24).

Bagan dibawah ini menjelaskan selisih dan jumlah banyak daerah yang dimekarkan tiap tahunnya hingga pada tahun 2007.

Bagan 1.
Tingkat Pemekaran di Indonesia Tahun 1999-2007



Sumber: Depdagri Otonomi Daerah

Sementara itu hingga pada tahun 2013 jumlah pemekaran terus bertambah di atas telah dijelaskan bahwa sejak tahun 1999 jumlah daerah otonom telah berkembang pesat dari 319 daerah otonom menjadi 524 daerah otonom (Provinsi, Kabupaten, Kota). Secara rinci perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Daerah Otonomi 1999-2013

JUMLAH DAERAH OTONOM	1999	PERUBAHAN	2013
Jumlah provinsi	26	8	34
Jumlah kabupaten	234	178	412
Jumlah kota	59	34	93
Total daerah otonom	319	220	539

Sumber: diolah dari Kemendagri (2013)

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pemekaran provinsi, kabupaten dan kota secara nasional terus mengalami peningkatan hingga sampai saat sekarang ini jumlah provinsi berjumlah 34 sementara kabupaten kota berjumlah 412 dan penambahan kota berjumlah 93. Total dalam 14 Tahun terakhir mengalami penambahan yang signifikan namun dalam kenyataannya sekarang ini tujuan dalam pemekaran daerah itu sendiri adalah belum mencapai pada target-target sasaran yang yang memuaskan.

Tri Ratnawati (2009:15) menulis bahwa hasil studi dari tim Bank Dunia menyimpulkan adanya empat faktor pendorong utama pemerakan di masa reformasi yaitu: *pertama*: motif untuk efektifitas/ efisiensi administrasi pemerintahan mengingat wilayah daerah yang begitu luas, penduduk yang menyebar dan keringgalan pembangunan *kedua*: kecenderungan untuk hegemonitas (etnis, bahasa, agama, urban-rural, tingkat pendapatan, dan lain-lain) *ketiga*: adanya kemanjaan fiskal yang dijamin oleh undang-undang (disediakkannya alokasi umum/DUA, bagi hasil dari sumber daya alam dan disediakan sumber-sumber pendapatan asli daerah/PAD) *ke empat*: motif pemburu rente (*bureaucratic and politik rent-seeking*) para elit.

Tujuan pemekaran itu sendiri harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat usulan pemekaran itu sah dan dinyakan valid. Selanjutnya dapat dinikmati masyarakat yang berada pada suatu aerah hasil pemekaran tersebut. Usulan pemekaran daerah disahkan dalam bentuk undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR RI. Pemerintah, kemudian bertugas untuk memberikan nomor kepada undang-undang yang disahkan oleh DPR RI tersebut. Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara pemekaran yang telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, seperti yang diamanatkan pada PP No.129 Tahun 2000. Lalu kemudian Kabupaten Labuhanbatu Utara sah dimekarkan dan di berikan nomor sebagai UU No.23 Tahun 2008.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Meski beberapa berbentuk data kuantitatif seperti data tentang jumlah sarana, index pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Dengan pendekatan kualitatif ini akan dapat menghasilkan data yang tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati dilapangan. dalam mengamati fenomena yangreal terhadap dampak pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara atas Pengembangan Pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sehingga menarik bagi peneliti memfokuskan pada pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.

Creswel (2002:84-92) dalam Rian Nugraho (2000: 601) menyatakan tujuan penelitian melalui kualitatif dipandang Alston dan Bowles adalah:

"...qualitative research re more interested in understanding how others experience life, in interpreting meaning and social phenomena, and in exploring new consepts and developing new theories (alston and bowles: 1998-9)

Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara.

Profil Kabupaten Labuhan Batu Utara

50 - 54	7 245	7 532	14 777
55 - 59	5632	5 497	11 129
60 - 64	3 241	3 453	6 694
65 - 69	1 989	2 470	4 459
70 - 74	1 552	1 814	3 366
75+	1 610	1 956	3 566

Sumber / Source : BPS Kabupaten Labuhanbatu (2012)

Tabel diatas cenderung berubah drastis jika dibanding dengan sebelumnya yakni pada tahun 2010 lalu. Dimana angka sekarang mengalami peningkatan secara konstan. Meningkatnya jumlah penduduk tidaklepas dari pada masuknya pendatang baru dari luar darah kabupaten labuhanbatu utara. Angka jumlah penduduk didominasi oleh usia 0-4 tahun yaitu masukdalam ruang lingkup balita dan di susul usia 10-14 tahun dengan total 37.810 penduduk dan paling kecil di temapati pada usia 70-74 tahun dengan jumlah 3.366 penduduk.

Tabel 2.
Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dan Dusun
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Labuhanbatu Utara
2012

No	Kecamatan <i>District</i>	Desa	Kelurahan	Lingkungan	Dusun
1	Na Ix-X	12	1	7	76
2	Marbau	17	1	5	100
3	Aek Kuo	8	0	0	50
4	Aek Natas	11	1	1	71
5	Kualuh Selatan	11	1	14	116
6	Kualuh Hilir	6	1	9	85
7	Kualuh Hulu	11	2	27	103
8	Kualuh Leidong	6	1	14	45
	<i>Jumlah / Total</i>	82	8	86	619

Sumber/ Source: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara (2012)

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya desa, kelurahan, lingkungan dan dusun cenderung mengalami perbedaan untuk jumlah desa masih di kuasai oleh kecamatan Merbau dengan banyak desa sebanyak 17 dan jumlah dusun berjumlah 100 dan jumlah lingkungan berjumlah 5 sementara jumlah kelurahan berjumlah 1 kelurahan. Sementara untuk angka desa di ikuti oleh kecamatan na ix-x

dengan jumlah 12 desa dan jumlah dusun berjumlah 100. Dan angka perbedaan jumlah dusun jauh dimiliki oleh kecamatan kwaluh selatan dengan jumlah dusun 116 angka tersebut merupakan angka yang paling besar dari tarap angka jumlah dusun yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Angka jumlah desa, kelurahan, dusun dan lingkungan cenderung fluktuatif dengan jumlah lainnya terhadap jumlah yang ada di kecamatan Labuhanbatu Utara.

3. Pembahasan

3.1. Pemaknaan Pemekaran Daerah Di Labuhanbatu Utara

Pemekaran seringkali dianggap sebagai solusi terhadap kesenjangan hidup di daerah dewasa ini. Banyak pihak-pihak yang berpendapat positif terhadap pemekaran, makan pemekaran daerah merupakan instrument penting untuk memberdayakan daerah, memperpendek *span of control*, dan merebut dana perimbangan dari pusat. Sebaliknya dari sudut pandang yang lain, pemekaran adalah cara pemerintah pusat untuk memecah bela daerah dengan menguasainya *divide and rule* seperti yang banyak di praktikkan oleh kolonial belanda masa lalu. Kajian akademis mengenai pemekaran daerah perlu dilakukan secara serius dan koprehensif karena akan terkait dengan konseptualisasi reformasi kewilayahan yaitu menajemen tentang ukuran, bentuk dan hirarki unit-unit pemerintah daerah untuk mencapai tujuan-tujuan administrasi dan politik suatu Negara.

Di samping itu studi mengenai pemekaran daerah juga penting untuk menyempurnakan konsep otonomi daerah dan pembangunan bangsa yang multicultural di Indonesia. Selanjutnya semangat "nasionalisme lokal" atau segregasi lokal perlu dikelola oleh pemerintah pusat dengan bijak sehingga tidak menjadi ancaman bagi pembangunan nasional dan integrasi nasioal. Pandangan lain terhadap pemaknaan pemekaran itu sendiri menjelaskan bahwa kebijakan pemekaran di seluruh daerah di indonesia itu sangatlah penting tetapi dengan catatan untuk yang positif. Artinya pemekaranan itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuannya berdasarkan undang-undang dan kepentingan masyarakat guna untuk mendekatkan pelayanan prima kepada masyarakat yang sangat membutuhkannya bukan sebaliknya. tegas saya katakan pemekaran itu perlu dilakukan manakala pemekaran itu sendiri memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah di seluruh wilayah Indonesia¹. Untuk Labuhanbatu Utara sendiri pemekaran itu sendiri memang belum mampu secara usulan pemerintah namun karena ada nama anakperantau ya kamilah yang ada di jakarta. Ide pemekaran ini prosesnya sangat panjang.pada saat saya berkunjung ke calon kabupaten baru yaitu labuhan batu utara masyarakat menyambut kami dari jakarta dengan positi di barengi dengan anggota DPRD dan kalngan ormas-ormas sebab saya katakan di sela acara pertemuan itu tugas dan weweanang anggota DPR adalah sebagai representasi rakyat. Ide pemekran pada saat itu adalahbukan karen ide untukbagi-bagi jabatan tetapi untuk rakyat, kalau idenya seperti itu maka hasilnya adalah nol atau (sib alis kohom) karena itu akan menjadi suatu kendala besar yang akan menjadi malapetaka pembentukan daerah baru.

Penelitian dampak pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008 terhadap pengembangan pembangunan daerah otonomi baru Kabupaten Labuhanbatu Utara

¹ Wawancara Bapak Rambe Kamarulzaman Anggota DPR-RI dapil sumut II tgl 15 agustus 2013 pukul 17.05

merupakan model formatif yakni penelitian dampak yang digunakan adalah untuk melihat sejauhmana dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap pemekaran yang terjadi di tahun 2008.

Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu itu sendiri secara pribadi saya katakan menimbulkan raja-raja kecil yang ingin melakukan tindak korupsi mengapa dengan lantang saya katakan demikian bahwa pemekaran meskinnya semua harus disiapkan sedemikian rapi agar tidak ada persoalan seperti yang saya singgung dalam pembicaraan tadi dimana anggaran tetap saja masih di bebankan kepada kami sebagai daerah induk. Memang secara undang-undang kami wajib memberikan dana yang diperbantukan oleh pemerintah melalau isi undang-undang. Dengan catatan apabila daerah induktidak memberikan dana bantuan kepada daerah otonomi baru saat dikatakan sah sebagai daerah otonomi baru makadaerah induk secara otomatis dikurangi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang disesuaikan dengan kemampuannya sebagai daerah induk. Persoalannya adalah saya kurang sepakat di dalam berkas pengajuan pemekaran tersebut penyusunanpembagian pegawai tidak di singgung sehingga kami terasa terbabani selama tidak kurang dari lamanya 3 bulan pada tahun 2009 yakni di bulan januari, februari, maret kami sebagai induk selalau memberikan gaji pegawai-pegawai daerah otonomi baru sementara mereka sendiri telah memiliki dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Pembagian wilayah terhadap pemekaran kabupaten Labuhanbatu Utara sesuai dengan isi undang-undang no 23 tahun 2008 bahwa daerah otonomi baru Kabupaten Labuhanbatu Utara resmi berpisah dari kabupaten induk. Makna tersendiri terhadap pemekaran itu sendiri pada dasarnya adalah cenderung menimbulkan propaganda persepsi yakni sebagian kalangan tertentu melihat bahwa pemekaran itu sendiri cenderung atas kepentingan para elit untuk saling membagikekuasaan.namun sebaliknya kalangan yang memiliki persepsi baik terhadap dampak pemekaran itu sendiri dapat sebagai penopang percepatan pembangunan suatu daerah untuk lebih maju dan berdaya saing.

3.2. Dampak Pemekaran Daerah Otonomi Baru Berdasarkan PP No 129 Tahun 2000

3.2.1 Dimensi Pendidikan

Pembangunan fasilitas pelayanan daerah sudah seharusnya disesuaikan dengan pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya. Semakin banyak jumlah penduduk disuatu daerah maka sewajarnya jumlah penyediaan layanan juga ditingkatkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat². Pelayanan publik yang dibahas dalam penelitian ini dikhususkan pada pelayanan pendidikan dan kesehatan. Bahwasanya eksistensi Negara adalah demi masyarakatnya, Negara baru bermakna apabila keberadaan Negara memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, Negara secara umum mempunyai tugas untuk menjamin terselenggaranya kesejahteraan bagi anggota masyarakatnya yang lemah yang pendapatan kurang atau miskin, yang sakit, cacat atau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari keterlantaran. Kesejahteraan umum adalah suatu tertentu yang dirasakan oleh publik mengenai

² Hesti 2012. *Filosofi Pelayanan Publik*. hal: 48

kehidupannya yang baik dan berkeadilan kondisi public yang sejahtera dapat dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang bebas dari perasaan lapar, kemiskinan, kecemasan akan hari esok, perasaan takut dari penndasan dan ketidakadilan. Fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai akan mendukung peningkatan kualitas masyarakat sehingga pendidikan dan kesehatanpun menjadi indikator penting bagi nilai IPM suatu daerah untuk mampu bersaing dan menuju masyarakatyang mapan dan mandiri.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia yaitu SNI 03-6981-2004, satu buah fasilitas Sekolah Dasar (SD) wajib disediakan untuk minimal penduduk sejumlah 1600 jiwa, sedangkan untuk SMP dan SMA sejumlah 4800 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Labuhanbatu Utara jumlah penyediaan sekolah eksisting masih jauh dari standar yang ditetapkan. menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah eksisting di Labuhanbatu Utara belum seimbang dengan jumlah penduduk yang ada, pertambahan jumlah penduduk tidak sebanding dengan peningkatan penyediaan sekolah diberbagai tarafnya. Oleh karena itu diperlukan adanya penambahan jumlah penyediaan sekolah guna menunjang pemerataan pelayanan, serta peningkatan kesejahteraan.

Tabel 3.

Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2012

Penduduk/ Population (orang)

Kelompok Umur (1)	Laki-laki (<i>Male</i>) (2)	Perempuan (<i>Female</i>) (3)	Jumlah <i>Total</i> (4)
5 - 9	19124	18 361	37 485
10 - 14	19 427	18 383	37 810
15 - 19	17 560	16 602	34 162

Data tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya penduduk menurutkelompok umur cenderung di kuasai oleh usia 10-14 dengan jumlah 37.810 cenderunglebih dominan dibandingkandengan kelompok usis lainnya angkatersebut diikuti olek kelompokusia 5-9 tahun dengan total jumlah37.485 dan yang terakhir diikuti oleh usia 15-19 tahun dengan jumlah 34.162

Tabel 4.

Jumlah Murid, Guru dan Sekolah Negeri dan Swasta di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2012

Uraian	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Jumlah Sekolah
SD	52.649	3.578	288
SMP	11.044	929	47
SMA	6.211	475	15
SMK	4.892	385	14

Sumber: dinas pendidikan labuhanbatu 2012

Berdasarkan data yang tertera diatas menyimpulkan bahwa jumlah fasilitas pendidikan di kabupaten Labuhanbatu Utara mencukupi dari pembanding yang dilakukan oleh badan standar nasional Indonesia tahun 2004 artinya ketersediaan jumlah fasilitas sekolah dasar (SD) setelah pemekaran dilakukan semakin bertambah dan tidak menutup kemungkinan untuk ketersediaan sekolah masih dalam kategori cukup untuk menampung beberapa anak didik baru. Begitu juga dengan untuk fasilitas sekolah SMA dan SMK di Labuhanbatu Utara masih mencukupi. Kalau untuk ketersediaan alat dan fasilitas pendidikan baik itu SD, SMP, SMK negeri dan swasta kalau untuk daerah Labuhanbatu Utara sudah bisa dikatakan mencukupi setelah adanya pemekaran daerah Labuhanbatu pada tahun 2008. Melihat tabel diatas bahwa dalam mengukur suatu partisipasi angka sekolah adalah jumlah usia didik yang masih menempuh pendidikan per 1.000 jumlah penduduk yang masih menempuh usia pendidikan yang dapat di artikulasikan sebagai berikut yakni dimana angka usia anak didik (16-19 tahun) adalah berjumlah 11.103 yang masih menempuh usia pendidikan dikabupaten Labuhanbatu Utara dan angka tersebut di kurang dengan jumlah penduduk yang berusia antara 16-19 tahun secara keseluruhan dengan total 34. 162 sehingga jika dikurangkan maka hasil yang tidak bersekolah mencapai 23.059 itu berarti bahwa lebih besar angka yang tidak menempuh pendidikan.

Oleh sebab itu dapat di katakan bahwa angka partisipasi pendidikan dikalangan usia 16-19 tahun cukup meningkat dengan pesat jika bertolak dari pada indikator. Menetapkan bahwa dampak pemekaran itu sendiri memberi ruang yang besar bagi peningkatan angka partisipasi anak usia 16-19 tahun untuk menempuh pendidikan. Begitu hal nya dengan angka partisipasi usia sekolah dasar dan menengah peningkatannya cukup signifikan. Terkait dengan fasilitas ketersediaan sekolah yaitu dapat diukur dengan jumlah sekolah tingkat pendidikan baik itu SD, SMP, Dan SMA. Jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Seperti yang terdapat dari data diatas menerangkan bahwa angka usia pendidikan 16-19 tahun berjumlah 29 sekolah sementara itu jumlah usia pendidikan berjumlah 11.103 sementara itu angka jumlah penduduk usia pendidikan berjumlah 34.162. maka, jika di kalkulasikan jumlah penduduk usia 16-19 dengan yang sedang menempuh pendidikan maka selisihnya adalah 23.059. sehingga jumlah ketersediaan sekolah bagi yang sedang menempuh pendidikan dengan jumlah 11. 162 dengan kata lain bahwa dalam rasio sekolah rata-rata hanya mencapai 384 usia pendidikan per sekolah angka tersebut jauh berbanding dengan sub indikator dimana rasio ketersediaan fasilitas sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan.

Tabel 5.

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Labuhanbatu Utara
School Participation Rate of Labuhanbatu Utara Regency
2011 dan 2012

Angka Partisipasi Sekolah <i>School Participation Rate</i>	Tahun 2011	Tahun 2012
7 - 12	98,00	98,75
13 - 15	87,93	89,74
16 - 18	56,12	56,20
19 - 24	9,07	10,87

Sumber / Source : BPS Kabupaten Labuhanbatu

Angka partisipasi yang terlihat pada tabel menandakan bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yang mana pada usia 7-12 tahun 2011 pada level angka 98,00 pada tahun 2012 menjadi 98,75. Sama halnya dengan usia lainnya kenaikan pada level angka bervariasi dari angka tahun 2011 terhadap perubahan tahun 2012.

Pemerintah yang ada saat ini bisa dikatakan cukup tanggap disegala bidang dan beliau tahu apa persoalan yang dihadapi masyarakat selain tau apa persoalan masyarakat beliau juga sering mengajak masyarakat berdiskusi secara mendadak turun langsung ke plosok-plosok kampung untuk mencari persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Dampak pada pemekaran itu sendiri kami sebagai tokoh masyarakat cukup bangga memiliki kepemimpinan bapak bupati yang sekarang ini. Selain itu juga Bapak Bupati sekarang memberikan beasiswa kepada anak didik yang mendapat prestasi atau rangkin di sekolah masing-masing³.

Capaian dibidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Keberadaan sekolah dan akses menuju sekolah merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian di bidang pendidikan. Secara umum keberadaan SD, SMP dan SMA sudah memadai dan tersedia di setiap kecamatan. Ketersediaan guru merupakan salah satu faktor penting lainnya yang mendukung keberhasilan dibidang pendidikan⁴. Jika dilihat dari kuantitasnya ketersediaan guru di Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari rasio guru terhadap murid. Seorang guru rata-rata mengajar 15 orang siswa untuk jenjang pendidikan SD, untuk jenjang pendidikan SMP seorang guru rata-rata mengajar 12 orang siswa. Pada jenjang pendidikan SMA sederajat yang terdiri dari SMA dan SMK seorang guru rata-rata mengajar 13 orang siswa.

Tabel 6.

Indikator Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara 2010-2012

Uraian	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
Angka Melek	98,17	98,53	98,90

³ Wawancara dengan Bapak Abdul Saleh tanggal 7 september 2014 pukul 16.20

⁴ Labuhanbatu utara dalam angka 2012

Huruf			
Rata-rata Lama Sekolah	7,91	8,01	8,26

Sumber: diolah penulis data bps

Angka melek huruf penduduk Kabupaten Labuhanbatu Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini berarti semakin berkurangnya jumlah penduduk yang tidak dapat baca/tulis atau buta huruf. Tercatat angka melek huruf penduduk usia 10 tahun keatas Kabupaten Labuhan-batu Utara di tahun 2012 sebesar 98,90 persen. Terkait dengan biaya pendidikan di labuhanbatu utara sendiri sampai sekarang uang sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah itu gratis (tidak dipungut biaya) memang itu program dari pusat tetapi kami sendiri sebagai orang tua wali murid sangatmerasa tertolong dengan program pemerintah yang ada saat ini. Harapannya semoga kedepan program bijak pemerintah semakin baik lagi untuk dunia pendidikan. Sebab menurut saya pendidikan itu penting agar tidak adalagi namanya masyarakat yang tidak bisa baca tulis⁵.

3.2.2 Dimensi Kesehatan

Tabel 7

Jumlah Rumah Sakit Umum Dan Sarana Tempat Tidur Yang Tersedia Menurut Kecamatan

(1)	<i>Pemerintah/state</i>		<i>Swasta/private</i>	
	(2)	(3)	(4)	(5)
kecamatan	Jumlah	Tempat Tidur Tersedia <i>Bed Available</i>	Jumlah	Tempat Tidur Tersedia <i>Bed Available</i>
Sungai Kanan	-	-	-	-
Torgamba Kota Pinang	-	-	1	100
Silangkitang	-	-	2	65
Bilah Hulu Kampung Rakyat	-	-	-	-
Pangkalan Bilah Barat	-	-	1	60

⁵ Hasil wawancara dengan bapak budi rambe di kota batu taggl 10 september 2014 pukul 10.10

NA IX-X				
Aek Natas	-	-	-	-
Aek Kuo Marbau	-	-	-	-
Bilah Hilir Panai Hulu	-	-	-	-
Panai Tengah	-	-	-	-
Panai Hilir	-	-	-	-
Kualuh Hilir Kualuh	-	-	-	-
Selatan				
Kualuh Hulu	-	-	-	-
Kualuh Leidong	-	-	-	-
Rantau Selatan	-	-	-	-
Rantau Utara	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	40
	-	-	-	-
	-	-	1	-
	-	-	-	-
	1	140	4	130

--	--	--	--	--

Sumber: di olah peneliti data BPS 2007

Data diatas menjelaskan bahwa jumlah rumah sakit pemerintah belum terlihat dalam data sebelum adanya pemekaran wilayah kabupaten Labuhanbatu Utara. Dimana jumlah Rumah Sakit umum masih berjumlah 1 yaitu berada di kecamatan rantau selatan yang sekaran ini berada di kabupaten Labuhanbatu Induk. Tetapi dampak dari pada pemekaran daerah Kabupaten Labuhanbatu sekarang Labuhanbatu Utara telah memiliki Rumah Sakit umum pemerintah sendiri tanpa harus jauh-jauh berobat ke Kabupaten Labuhanbatu Induk yang jaraknya mencapai 80 km per jam. Penambahan alat alat kesehatan yang ada di Labuhanbatu Utara terus mengalami peningkatan mulai dari penambahan pegawai negri daerah hingga pada kelengkapan alat-alat medis lainnya selan itu juga penambahan rumah sakit swasta terus meningkat hingga tahun 2014 . Hal senada disambut baik oleh masyarakat kabupaten Labuhanbatu Utara dengan adanya pemekaran daerah tersebut pada tahun 2008.

Dampak yang di rasakan oleh masyarakat Labuhanbatu Utara begitu banyak. Kami masyarakat Labuhan Batu Utara khususnya sangat merasakan dampak dari pada pemekaran daerah yang terjadi pada beberapa tahun lalu dan sekarang kami jauh lebih baik merespon kinerja pemerintah setempat apalagi pemerinah yang ada saat ini cukup tanggap dan baik bagi rakyat di desa-desa. Hal itu cukup menggembirakan kami sebagai warga yang pendapatannya dibawah rata-rata.⁶ Dampak pada pemekaran tersebut untuk layan kesehatan sebagai berikut:

Tabel 8.

**Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di
Kabupaten Labuhanbatu Utara
Tahun 2011 - 2012**

Sarana kesehatan	2011	2012
Rumah Sakit Umum	1	1
Rumah Sakit bersalin	-	-
Puskesmas	17	17
Posyandu	527	527
Klinik/ Balai Pengobatan	15	15
Dokter Umum	46	42
Dokter Gigi	8	10
Dokter Spesialis	1	1
Bidan	195	440
Perawat dan Pembantu perawat	183	453

⁶ Wawancara dengan Bpk. Bandit dikediamannya pada tanggal 7 september 2014 pukul 14.50

Klinik Keluarga Berencana (KKB)	25	25
---------------------------------	----	----

Sumber: diolah peneliti dari Bps Labura (2012)

Ketersediaan fasilitas kesehatan di kabupaten Labuhanbatu Utara cukup memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat keberadaan rumah sakit umum itu berada di pusat kota. Rumah sakit umum tersebut berjumlah 1 buah. Dan dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai sesuai dengan standar rumah sakit biasanya. Tenaga medis yang ada dirumah sakit umum tersebut berjumlah 42 dokter umum dan 10 dokter gigi serta 1 dokter spesialis. Selain dari rumah sakit umum tersebut pemerintah kabupaten Labuhanbatu Utara juga menyediakan 17 puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah LABURA.

Presentase penolongan utama oleh bidan bagi keselamatan ibu melahirkan semakin tahun bertambah hingga mencapai 76.39 persen angka tersebut jauh lebih baik dari angka kelahiran yang ditangani oleh bidan yang tersebar di Sumatera Utara

Sementra itu penolongan lain yang ibu melahirkan yang ditangani oleh Dokter itu masih jauh berbanding dengan bidan setempat yaitu berkisar 6.31 persen namun data tersebut terus mengalami kenaikan. Meskipun angka penambahan fasilitas yang terdapat pada tabel diatas hal yang menarik dikemukakan oleh Bapak Abd. Soleh yang mengatakan bahwa dari segi kualifikasi tenaga medis yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara saat ini bisa dikatakan masih kurang jumlah penduduk yang semakin bertambah sudah selayaknya tenaga medis itu ditambahi dan di evaluasi kinerjanya agar lebih sigap dalam melayani pasien jangan cuek terhadap pasien yang sedang berobat. Etika seorang tenaga medis itu perlu dan merupakan salah satu obat bagi pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Namun jika di tanya soal kepuasan kinerja tenaga medis di Labuhan Batu Utara ini saya katakan cukup memadai bukan berarti tidak baik⁷.

Dari analisis diatas dampak dari pemekaran kabupaten labuhanbatu utara meskinnya dari total penduduk seharusnya telah berdiri 3 buah Rumah Sakit Umum bila kita bercermin dari pada Peraturan Pemerintah No 78/2007 dimana untuk pelayanan pendirian fasilitas kesehatan katakanlah seperti rumah sakit berbanding 10.000 per jumlah penduduk. Tetapi seiring berjalannya waktu laju pertumbuhan fasilitas di Labuhanbatu Utara terus mengalami kemajuan selain dari niat penambahan jumlah rumah sakit penambahan kantor-kantor kesehatan terus bertambah seperti Puskesmas Pembantu (PUSTU) yang tersebar di Desa-Desa kabupaten Labuhanbatu Utara.

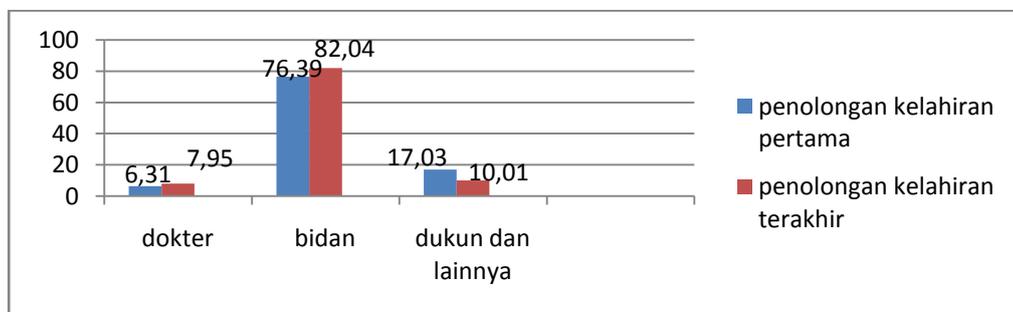
Program pemerintah mendistribusikan bidan yang akan di sebar di seluruh wilayah kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengupayakan ibu hamil agar melahirkan ditangani oleh para bidan yang ahli dalam bidangnya bukan sebaliknya kepada dukun desa. Data yang dilansir bahwa angka penurunan penanganan ibu hamil oleh dukun tiap tahunnya terus menurun hingga mencapai 17.3 persen. Masyarakat yang ada di Labuhanbatu Utara khususnya jika ada yang melahirkan pemerintah menyarankan agar di bawa ke rumah bersalin pemerintah

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak ABD. Soleh taggal 7 September 2014 pukul 16.20

terdekat bukan ke dukun desa. Jika warga atau ibu hamil ingin melakukan tindakan kesehatan di rumahnya maka dengan sendirinya akan dikenakan biaya sebesar 500.000 ribu rupiah di luar obat untuk keperluan persalinan. Dampak yang dirasakan oleh warga yang ada di Labuhanbatu Utara ini setelah adanya pemekaran sangat baik dimana dahulu tidak ada seperti ini kebijakan dari pemerintah atau saya tidak tahu apakah karna wilayah labuhanbatu dahulunya yang terlalau luas sehingga pelayanan bidang kesehatan tidak merata. Tetapi dengan adanya pemekaran Labuhanbatu Utara kami sebagai masyarakat desa merasa cukup tertolong dalam hal pelayanan kesehatan.⁸

Bagan 2.

Meningkatkan Angka Harapan Hidup (Ahh) dan Menurunnya Angka Kematian Ibu (Aki), Dan Angka Kematian Bayi (Akb).



Sumber: diolah peneliti

Pada diagram diatas menunjukkan bahwa angka harapan hidup bagi ibu dan anak semakin meningkat di tangani oleh bidan desa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah menempatkan bidan di seluruh puskesmas harus mempunyai keahlian yang benar-benar sesuai dengan kemampuannya. Penanganan ibu melahirkan dahulu sebelum adanya pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara masih banyak yang ditangani oleh dukun kampung atau lainnya. Dampak pada pemekaran itu sendiri memberikan income yang positif bahwa penanganan ibu melahirkan di lakukan di kantor kesehatan terdekat seperti halnya posyandu atau puskesmas. Jika kalau tidak dilakukan di kantor kesehatan terdekat masyarakat akan dikenakan biaya tambahan seperti mana yang telah tertuang dalam penjelasan diatas.

3.2.3 Dimensi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat artikulasikan sebagai inflikasi atas pertumbuhan angka peningkatan PDRB itu sendiri Sebagai Jangkar Indikator Makro Sosial dan Ekonomi. PDRB dapat dijadikan jangkar bagi indikator-indikator makro sosial ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu

⁸ Wawancara dengan Bpk. Ridwan tgl 16 september 2014 pukul 11.00

indikator makro untuk mengetahui kinerja perekonomian. Pertumbuhan tersebut merupakan rangkuman dari keseluruhan pertumbuhan sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi.

Jangkar yang menurut KBI (Kamus Besar Indonesia) dapat di contohkan sebagai pondasi ukuran seperti halnya alat pemberat yang dijatuhkan ke air (pada kapal, perahu, dan lain-lain) agar kapal berhenti dan tidak terbawa arus. PDRB sebagai jangkar indikator berarti apabila indikator PDRB “dijatuhkan dalam air” (dikaitkan) oleh indikator lain, PDRB dapat dijadikan patokan. Berbagai contoh PDRB sebagai jangkar indikator lainnya adalah:

1. Sebagai indikator pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penghitungan indikator tersebut adalah melalui *tax-ratio*, *PAD ratio*, dan *budget-ratio*. *Tax-ratio* adalah persentase perbandingan antara pajak dan PDB. Biasanya besaran *tax-ratio* itu sekitar 13 persen. *PAD-ratio* adalah persentase perbandingan antara PAD dan PDRB. Sedangkan *budget-ratio* adalah persentase perbandingan antara APBD dan PDRB.
2. PDRB dan pertumbuhan ekonomi adalah persentase pertumbuhan riil dari PDRB atas dasar harga konstan.
3. PDRB harus dapat mencakup dan mencatat, serta mengukur kegiatan ekonomi yang baru muncul.
4. PDRB secara otomatis dapat melihat sektor-sektor unggulan yang dapat dilihat dari besaran, kontribusi, dan pertumbuhannya, serta indikator terkait dengan makna unggulan.
5. Dengan dukungan data lain yang lebih rinci, PDRB dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kemiskinan dan pengangguran.
6. Dengan bantuan ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*) PDRB dapat digunakan untuk perencanaan tenaga kerja.
7. Menggunakan indikator ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan dapat direncanakan besaran investasi yang dibutuhkan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan.
8. Tingkat bunga akan berkorelasi dengan ekspektasi investasi. Dengan demikian dapat dikaitkan juga antara tingkat bunga, investasi, target penyediaan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 9.

PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku dan 2004-2012 (Jutaan Rp./ Million Rp.)

NO	Tahun/ Year	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku GDRP at Current Prices	Laju pertumbuhan (%)	Selisih harga berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2004	3 186 760,62	-	-
2	2005	3 680 101,62	15.48	-
3	2006	4 213 432,13	14.49	-0.99
4	2007	4 816 746,49	14.31	-0.18
5	2008	5 625 529,11	16.79	0.248
6	2009	6 284 978,78	11.72	-0.506
7	2010	7 161 088,39	13.94	0.222

8	2011r)	8 094 361,06	13.03	-0.91
9	2012*)	9 032 125,56	11.58	-0.145

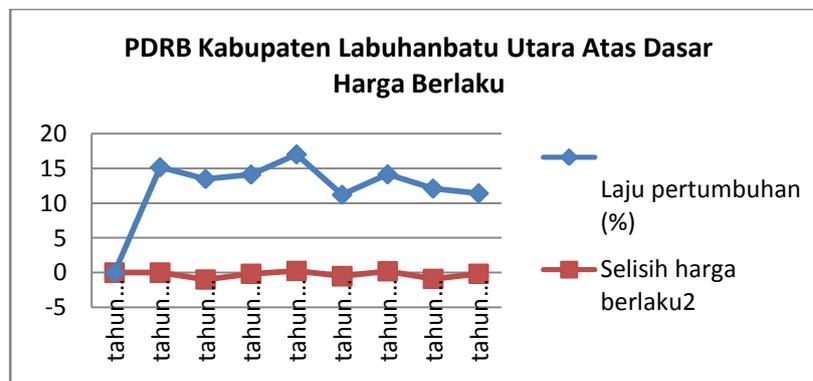
Catatan/ Note : *) Angka Sementara/ *Preliminary Figures*) Angka Perbaikan/
Revised Figures

Sumber/ *Source*: BPS Kabupaten Labuhanbatu / *BPS of Labuhanbatu Regency*

Data angka pertumbuhan atas harga konstan Masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara terhadap harga berlaku setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi peningkatan itu cenderung bersifat fluktuatif seperti halnya tahun 2005 angka selisih pertumbuhan berada pada kisaran 0.99 pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 0.18 artinya ada penurunan tetapi pada tahun 2008 mengalami peningkatan meski hanya berada pada posisi yang belum besar tetapi berada pada kisaran 0.248 begitu seterusnya. Angka pertumbuhan secara konstan menunjukkan bahwa angka tersebut cenderung tidak stabil.

Bagan 3.

PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar Harga Berlaku 2004-2012



Sumber: hasil olahan peneliti data BPS Labura (2014)

Seperti dijelaskan diatas sebelumnya PDRB merupakan salah satu tolok ukur kondisi per-ekonomian suatu kabupaten/kota. Dalam hal ini yaitu kabupaten Labuhanbatu Utara. Peningkatan harga per tahunnya mengalami peningkatan tetapi mengukur Berdasarkan data tahun 2004 hingga 2012, nilai PDRB LABURA terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara kalkulasi pendapatan dan ke ekonomian masyarakat yang ada di Labuhanbatu Utara jauh lebih baik dari sebelumnya dimana dengan adanya pemekaran masyarakat bisa lebih respons dengan kejikan pemerintah yang ada⁹. walaupun dengan peningkatan yang moderat dan laju pertumbuhan yang cenderung fluktuatif.

Hal ini dapat menggambarkan bahwa aktivitas perekonomian yang terjadi di Labuhanbatu Utara cenderung belum stabil. Penurunan laju PDRB pasca pemekaran kemungkinan dikarenakan adanya penyesuaian pengelolaan produk daerah oleh pemerintah daerah yang baru. Sehubungan dengan terjadinya peningkatan pada tahun 2012 yang cukup signifikan, kemungkinan perkembangan kedepannya laju pertumbuhan perekonomian daerah LABURA akan semakin meningkat. Pemekaran labuhanbatu utara adalah suatu keharusan sebab kabupaten tersebut secara ke ekonomian mampu berdiri tanpa harus ada bantuan dari kabupaten induk yaitu labuhanbatu pendapatan masyarakat terus bertambah dan masyarakat

⁹ Wawancara dengan Bpk. Zul. Staf. BPS labuhanbatu

berkehendak besar dengan adanya pemekaran tersebut, karena jelas memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan prima¹⁰.

Tabel 9.
PDRB Kabupaten Labuhanbatu Utara Atas Dasar harga konstan
2004-2012(Jutaan Rp./ Million Rp.)

NO	Tahun/ Year	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000	Laju pertumbuhan (%)	Selisih harga berlaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2004	2 314 935,57	-	-
2	2005	2 405 946,32	3.93	-
3	2006	2 509 680,09	4.31	0.38
4	2007	2 678 221,63	6.71	0.240
5	2008	2 842 977,92	6.15	-0.56
6	2009	2 993 328,33	5.28	-0.87
7	2010	3 163 216,40	5.67	-0.39
8	2011r)	3 359 752,30	6.21	0.54
9	2012*)	3 574 050,62	6.37	0.16

Sumber: BPS Kabupaten Labuhanbatu (2012)

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah khususnya bidang ekonomi. Pandangan bahwa ekonomi adalah sebuah system hubungan yang berbeeda dari sitem hubungan yang lain tidak memerlukan adanya konsep tentang pilihan dan kalkulasi oleh individu. Institusi ekonomi berdiri terus dalam waktu yang lama. Maka, bias jadi individu-individu dalam masyarakat membangun sistem ekonomi itu bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka saja, biarpun memang ada sebahagian dari tujuan dari institusi ekonomi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan. Konsep perekonomian memandang bahwa kegiatan ekonomi adalah sebuah realita sosial yang berdiri sendiri yang dapat mempengaruhi, membentuk dan bahkan mengatur motivasi dan pola pikir individu. Perekonomian adalah suatu yang memiliki tujuan tersendiri dan tujuan ini tidak tergantung pada apa yang menjadi pilihan para pelaku pasar ataupun kebutuhan akan reproduksi materi¹¹. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung akan menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi disuatu daerah. Selain itu indikator ini juga berguna untuk bahan perencanaan dalam menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Metode penghitungan PDRB yang digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi secara riil adalah PDRB dihitung atas dasar harga konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan penurunan. Walaupun

¹⁰ Wawancara dengan bpk. Rambe kamarulzaman (DPR-RI terpilih) tanggal 15 agustus 2013

¹¹ James A. 2008. Teori-teori ekonomi politik. Hal: 58

begitu, PDRB atas dasar harga berlaku tetap disajikan untuk melihat dan menelaah perkembangan PDRB sebelum dan sesudah pengaruh harga diperhitungkan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sebesar 6,37 persen. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan bila dibandingkan pertumbuhan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,21 persen. Laju pertumbuhan ekonomi per sektor pada tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif.

3.2.4 Beberapa Sektor Sumber Potensi Daerah

Di Labuhanbatu Utara sendiri potensi pertumbuhan pendapatan masyarakat lebih mendominasi pada pertanian namun hingga pada tahun 2012 mengalami perubahan yakni pada sektor industri jumlah dan potensi industri di Kabupaten Labuhanbatu Utara terus mengalami peningkatan jauh dari sebelumnya.

Tabel 10.
Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Labuhanbatu Utara 2008-2012

lapangan usaha/ <i>industrial origin</i> tahun/ <i>year</i>		2008	2009	2010	2011 ^r	2012 [*]
No	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian / <i>Agriculture</i>	2,44	2,24	2,33	2,14	2,09
2	Penggalian / <i>Quarrying</i>	0,07	0,09	0,09	0,10	0,09
3	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing Industry</i>	2,06	1,04	1,49	2,09	2,37
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih / <i>Electricity, Gas, & Water Supply</i>	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01
5	Bangunan / <i>Construction</i>	0,10	0,17	0,16	0,17	0,20
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran/ <i>Trade, Hotel, & Restaurant</i>	1,02	1,20	1,07	1,06	0,94
7	Pengangkutan dan Komunikasi / <i>Transportation &</i>	0,11	0,17	0,18	0,18	0,17

	<i>Communication</i>					
8	Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan / <i>Financial, Rental, & Business Service</i>	0,07	0,09	0,08	0,09	0,11
9	Jasa-jasa/ <i>services</i>	0,27	0,28	0,26	0,37	0,40

Catatan/ *Note* : (*) Angka Sementara/ *Preliminary Figures*

(r) Angka Perbaikan/ *Revised Figures*

Sumber/ *Source*: BPS Kabupaten Labuhanbatu

Pada tahun 2008 sektor pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara yang paling besar memerikan income adalah yaitu sektor pertanian berjumlah (2,44%) dan di imbangi oleh sektor lainya seperti industry yaitu (2.06) kemudian seiring berjalannya waktu dalam proses perkembangan pembangun kabupaten labuhanbatu terus mengalami kemajuan di berbagai sektor lainnya tetapi sektor yang paling drastis meningkat yaitu bidang industri yaitu 2012 sektor terbesar yang menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi Labuhanbatu Utara adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 2,37 persen, sektor pertanian sebesar 2,09 persen, kemudian sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 0,94 persen, sektor jasa-jasa sebesar 0,40 persen, sektor bangunan sebesar 0,20 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,17 persen, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 0,11 persen, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,09 persen, dan yang terkecil sektor listrik, gas, dan air minum sebesar 0,01 persen. Dalam pemekaran Kabupaten Labuhanbatu tidak terlepas dari pada keinginan pemimpin atau elit politik yang memiliki tujuan yang baik. Secara umum pemekaran daerah dilakukan harus memenuhi syarat yaitu infrastruktur dan lain-lain.

Dalam perkembangan pembangunan yang ada di Labuhanbatu Utara tidak terlepas dari pada pemimpin kepala daerahnya itu sendiri untuk melakukan lobi ke pusat dalam mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat sampai pada tahun ini labuhanbatu utara merupakan kabupaten yang endapat bantuan pemerintah pusat lebih dari 200 miliar rupiah. Itulah kehebatan dari pada kepemimpinan Bupati yang ada di Labuhanbatu Utara saat ini. Beliau mampu menembus anggran dengan melobi anggota DPR-RI dari dapil Sumut-II. Begitu lah cara pemerintah yang ada saat ini untuk mengembangkan Labuhanbatu Utara ide pemimpin daerah itu sangat penting dan berani dalam mengambil kebijakan¹².

Berikut ini adalah jumlah industri yang dikelola pemerintah dan swasta pada saat melakukan wawancara dengan Bapak Freddy Simangunsong beliau mengatakan bidangindustri labahuanbatu utara sendiri sangat potensi sekarang aja untuk pembangunan industri kelapa sawit masih dalam proses ini yang menjadi semangat pemerintah dan masyarakat dalam pengupayaan pembangunan tersebut. Semakin besar angka industri di Labuhanbatu Utara maka otomatis pendapatan masyarakatakan semakinmembaik apalagi hal tersebut akan mampu mengurangi angka pengangguran.

¹² Wawancara dengan Bpk. Fredy Simangunsong. Ketua okp KNPI tanggal 8-September 2014 pukul 14.30

3.2.5. Dimensi Pembangunan Infrastruktur

Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditentukan dalam system pengawasannya. Berdasarkan system pengawasannya inilah terbentuk tat hubungan pemerintahan dalam suatu Negara¹³.

Tabel 11.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan
di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2008 - 2012
(Km)

Kondisi Jalan <i>Road Condition</i>	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
Baik/ <i>Good</i>	-	-	579	613	632
Sedang/ <i>Fair</i>	-	-	128	162	181
Rusak/ <i>Poor</i>	-	-	131	97	78
Rusak Berat/ <i>Very Poor</i>	-	-	226	192	173
jumlah	-	-	1 064	1 064	1 064

Sumber/ *Source* : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

(Data tahun 2008 masih tergabung dengan kabupaten induk)

Tabel diatas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengalami peningkatan perbaikan hal ini dapat dilihat dari angka Bps labuhanbatu utara dalam angka. Pembangunan infrastruktur sitiap daerah meiliki persoalan yang berbeda-beda pula yakni berbeda sumber pendapatan utama daerah dan sikap pengambil kebijakan pemerintah daerah akan menjadikan adanya ketimpangan dalam hal pembangunan. Sikap kebijakan pemerintah yang akuntabel bertanggungjawab pada beban kerjanya akan lebih baik dibanding dengan kebijakan pemerintah yang tidak efektif hal ini dapat dilihat dari pada keterangan bapar freddy semangunsung mengatakan bahwa hubungan pemerintah saat ini antara daerah dan pusat sangat baik mengapa saya katakan baik, sebab beberapa bulan yang lalu pemerintah melalui Bapak Bupati pandai melakukan lobi-lobi anggaran guna untuk pembangunan Labuhanbatu Utara yang leih baik anggara tersebut berkisan 200 miliar rupiah untuk tahun ini jauh berbanding dengan Kabupaten Labuhanbatu Induk saat ini mereka hanya mendapat 7 miliar yang dahulunya mendapat lebih dari 10 miliar itu lah kehebatan pemerintah melalui bupati melobi anggarapa sampai kepusat.

Pemerintah saat ini berani mangambil langkah-langkah kongkrit dalam mengajukan permohonan. masalah korupsi menurut saya korupsi bias saja terjadi tetapi kalau itu untuk kepentingan masyarakat banyak mengapa tidak, selagi itu guna membangun Labuhanbatu Utara yang lebih maju, menurut saya temuan dilapangan masyarakat pun turut senang dengan dampak kemajuan Labuhanbatu

¹³ Nurcholis hanif. 2007. Teori dan praktik pemrerintahan dn otonomi daerah hal: 59-60

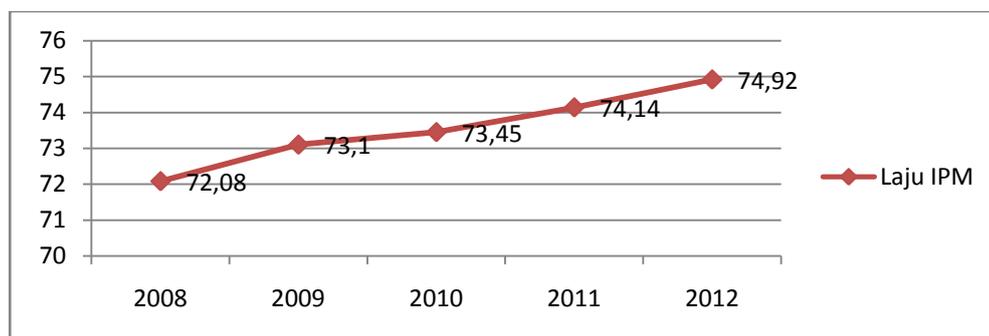
Utara saat ini. menurut saya kalau untuk angka pengangguran di Labuhanbatu Utara saat ini jauh berkurang karna inti bagian dari pemekaran itu mengurangi angka pengangguran. Secara pribadi saya merasa dampk dari pemekaran itu sendiri baik sejauh para pengambil kebijakan itu tidak memiliki niat jahat untuk memanipulasi anggaran dan mendustahi suara rakyat¹⁴. Sementara bapak Abdul Saleh mengatakan dengan adanya pemekaran tahun 2008 pembangunan di daerah ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya sebab anggaran itu sudah langsung dirasakan oleh masyarakat kalau dahulu sebelum pemekaran anggaran itu tidak terasa karna luasnya daerah yang harus dibangun belum lagi ada mafia-mafia yang bermain mengkorupsi anggaran sehingga pembangunan itu tidak kelihan dan tidak dirasakan manfaatnya. Kalau sekaran disetiap dusun, jalan-jalan kecil saja bisa dikatakan sudah meraskan pengaspalan kalau dahulu sama sekali tidak begitu manfaat pemekaran dalam pembangunan infrastruktur sangat besar¹⁵.

3.2.6. Dimensi Pengembangan SDM (*Human Index*)

Tiga pendekatan selanjutnya berdasar asumsi redistribusi asset sebagai suatu prakondisi. Irma Adelman berpendapat bahwa revolusi bukanlah pilihan Negara-negara ini menjadi semain buruk. Dia mengajukan jalan *human resuorse development* untuk mencapai pertumbuhan dengan pemerataan. Suatu prakondisi untuk sukses adalah redistribusi asset produktif, seperti tanah da modal fisik sebagai contoh jepang,Taiwan dan korea. Persyaratan juga harus dibuat untuk menjamin berlangsungnya akses asset bagi orang miskin setelah distribusi dilaksanakan. Element berikutnya dari strategi ini adalah program masa untuk mengembangkan sumber daya manusia, sebagaimana pernah terjadi di korea¹⁶.

Bersamaan dengan penciptaan sumber daya manusia itu, langkah selanjutnya adalah industriaisasi sumber daya secara intensif dan strategi pertumbuhan.

Bagan 5.
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Labuhanbatu Utara 2008-2012



Sumber: analisis data Bps Labuhanbatu Utara

¹⁴ Wawancara dengan Bpk. DR. H. Freddy simangunsong 8 September 2014 Pukul: 14.30

¹⁵ Hasil wawancaradengan bapak abd. Saleh. Tanggal 7 september 2014

¹⁶ Fakih mansour, 2001. Runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi hal.66

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan grafik di atas terlihat peningkatan IPM sejak tahun 2008 sebesar 72,08 menjadi 74,14 pada tahun 2011 dan meningkat lagi ditahun 2012 menjadi 74,92. Hal ini juga disertai dengan kenaikan peringkat IPM Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut propinsi yang berada pada peringkat 17 di tahun 2010 menjadi peringkat 13 pada tahun 2012. Di Labuhanbatu Utara sendiri memang terjadi perubahan dari segi pembangunan manusia dimana masyarakat telah banyak mengetahui yang namanya media-media yang sifatnya online dan peluang mendapatkan pekerjaan semakin tinggi faktorutamanya itu menurut saya adalah semakin dekatnya pelayanan kepada setiap masyarakat yang dilkakukan oleh pemerintah seperti halnya sosialisasi yang selalu di berlakukan¹⁷. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi shortfall per tahun. Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal (IPM=100). Adapun nilai *reduksi shortfall* untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebesar 3,03 yang artinya mengalami percepatan kenaikan pertahun sebesar 3,03 persen pertahun.

Hasil penghitungan IPM bergerak 10-100 dengan pengertian bahwa bila angka IPM kecil berarti kualitas sumber daya manusia masih relatif rendah dan demikian pula sebaliknya bila angka IPM nya lebih tinggi. Sebagai contoh untuk hasil penghitungan IPM pada masing-masing provinsi di indonesia untuk priode 1999-2011 diperoleh dari beberapa terbitas BPS. Perkembangan angka IPM tersebut adalah dapatdi lihat dari data yang tertera diatas. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) di indonesia memiliki rata-rata 64,3 yakni pada tahun 2011 angka tersebut naik di angka 72,77. Maka, apabila angka tersebut lah yang digunakan dalam analisis pertumbuhan angka pembangunan manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara secara otomatis labuhanbatu utara sudah sangat layak dan peningkatan pada angka IPM Tahun 2013. Disamping itu terdapat variasi yang cukup besar dari angka IPM antara daerah sesuai perkembangan pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang terdapat pada masing-masing provinsi. Daerah yang mempunyai angka IPM tertinggi di indonesia adalah DKI yaitu sekitar 78,0 yang merupakan provinsi paling maju di indonesia. Sedangkan provinsi yang paling terkebelakang adalah provinsi Papua dengan angka IPM nya berkisar di angka 65,0. Perbandingan angka IPM yang ada di indonesia terjadi ketimpangan di daerah-daerah sehingga di perlukannya perhatian dari pemerintah pusat dalam hal memonitoring angka IPM agar menjadi rakyat sejahtera sesuai dengan perundang-undangan.

Tabel 12.

**Statistik Kemiskinan Kabupaten
Labuhanbatu Utara 2011-2012**

URAIAN	2011	2012
Garis Kemiskinan	294.794	329.287

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Adb. Saleh di Kab Labuhanbatu Utara (kec: kota batu) tanggal 7-9-2014

(Rp/kapita/bulan)		
Persentase Penduduk Miskin (%)	11,77	11,34
Jumlah Penduduk Miskin	39,30	38,10

sumber : susenas 2011-2012

Data statistik diatas menguraikan bahwa setelah pemekaran berlangsung angka garis kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara terus mengalami penurunan hingga tahun 2012 angka kemiskinan berjumlah 38.10 persen sementara tahun sebelumnya berjumlah 39.30 persen hal ini cukup memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat dalam manfaat pemekaran tahun 2008 yang lalu jika dibandingkan dengan Kabupaten Labuhanbatu Induk angka tersebut jauh lebih baik dan penurunan angka kemiskinan berkelanjutan tiap tahunnya dampak dari pemekaran itu sendiri membuahkan hasil yang positif bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat Labuhanbatu Utara saat ini.

Berbicara mengenai IPM maka kita tidak dapat lepas dari masalah kemiskinan karena kondisi IPM dan kemiskinan yang saling terkait ibarat dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Terdapat kenaikan standar garis kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi 329.287 Rp/Kapita/bulan yang tentu saja mempengaruhi persentase dan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2012. Walaupun terjadi peningkatan nilai garis kemiskinan namun persentase penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu Utara secara proporsi dan absolut mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Labuhanbatu Utara mengalami penurunan menjadi 11,34 persen di tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 381.000 jiwa.

Namun penurunan angka kemiskinan berkurang tidak berarti bahwa penerima bantuan dari pemerintah semakin berkurang seperti yang di kemukakan oleh bapak lohot pohan yakni: Yang menerima Bantuan Langsung Tunai banyak yang mendapat pada saat itu programnya SBY, warga mendapat bantuan 300 ribu per bulannya. Namun tahun 2014 ini masyarakat tidak lagi mendapat bantuan langsung tunai data penerima bantuan tiap tahun bertambah dan biasanya yang mendapat bantuan itu berkumpul sama-sama menuju kantor pencairan uang terdekat seperti kantor pos dan kadang ada yang diwakilkan jika sudah tua ya kadang diwakilkan dengan catatan membawa persyaratan.

Hal senada yang dikemukakan oleh Bapak H Abd. Soleh bahwa kami masyarakat disini memang mendapatkan bantuan itu dengan mengambil ke kantor pos dan saya kira dengan bantuan segitu masyarakat belum merasa terbantu karena biaya kehidupan yang semakin tinggi. Dan pembagiannya ada yang belum merata dan saya kira perlu diperbaiki, agar tidak ada yang salah sasaran. Jumlah yang mendapatkan bantuan langsung tunai pada saat itu cukup mendapat sambutan positif tetapi tidak sesuai dengan harga kebutuhan hidup. penerima bantuan itu dari tahun ketahun bertambah tetapi tidak banyak yang bertambah hanya beberapa orang saja ada bahkan yang sudah mendapat bulan lalu kemudian bulan yang akan datang dia tidak mendapat. Sebab pembagiannya disesuaikan dengan kemampuan yang berhak mendapat.

Artinya angka penurunan kemiskinan berdasarkan data yang tertera diatas tabel menunjukkan bahwa masyarakat masih merasa berada dibawah garis kemiskinan. Mayoritas masyarakatmengharapkan bantuan terus mengalir dari pemerintah. Simpulan yang di dapatkan bahwa masyarakat akan semakin termanjakan dengan kebijakanpemerintah seharusnya menawarkansolusi bukan membuat masyarakat meras semakin dimiskinkan dengan kebijakan akhirnya malas bekerja.

4. Penutup

Dalam penelitian ini secara keseluruhan memberikan pandangan bahwa sehubungan dengan undang-undang no 32 tahun 2004 dan PP No 129 tahun 2000 pemekaran daerah dilaksanakan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan pelayanan harus merata dan efektif. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan suatu keharusan bagi peneliti untuk mendeteksi hasil pemekaran. Jika penelitian terdahulu sebelumnya telah menyinggung persoalan tentang evaluasi dampak pemekaran Kabupaten Bandung Barat memberikan dampak yang positif meski dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat belum mampu mengimbangi kemajuan dari pada kabupaten induk sendiri yaitu Kabupaten Bandung, dalam penelitian lainnya juga mengalami peningkatan kesejahteraan, namun dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peningkatan tersebut mengalami kesenjangan antara wilayah Barat dan Timur di Indonesia secara keseluruhan. Dalam penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa Kabupaten Labuhanbatu Utara mampu bertumbuh kembang dengan pesat dan menempati peringkat 9 di wilayah Sumatera Utara dari 33 kabupaten/kota termasuk didalamnya Kabupaten Labuhanbatu Induk sebelum pemekaran tahun 2008. Penelitian menjadi baik bagaimana sebenarnya dampak pemekaran yang terjadi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan adanya problem yang kuat bagi daerah otonomi baru, gonjang ganjing persoalan dalam akselerasi pembangunan namun tidak menepis angka kemiskinan, infrastruktur, pembangunan manusia dan lain sebagainya. Seperti hal ini yang ada di daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pemekaran dimaknai sebagai hal yang luar biasa memberikan dampak yang signifikan di beberapa sektor salah satunya antara lain: *pertama* perkembangan pembangunan di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Labuhanbatu Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2012 sebesar 6,37 persen. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan bila dibandingkan pertumbuhan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,21 persen. Laju pertumbuhan ekonomi per sektor pada tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Bila diamati dari beberapa indikator pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara peningkatan yang terjadi cukup baik jika dibandingkan sebelum pemekaran perkembangan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara berdampak positif bagi kelangsungan perekonomian masyarakat setempat. Mengenai perbandingan pada berbagai indikator pengembangan wilayah antara Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai daerah hasil otonomi daerah atau daerah otonom dan Kabupaten Labuhanbatu sebagai induk, secara umum perkembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara yang semakin meningkat setiap tahunnya dikatakan belum mampu untuk

mengimbangi ketercapaian yang telah diperoleh Kabupaten Labuhanbatu Induk. Ketimpangan pembangunan terus terjadi antara Kabupaten Labuhanbatu Induk dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana tiap tahunnya pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara terus mendapat subsidi dari pemerintah pusat tahun 2013 lalu pemerintah mendapatkan donor atau bantuan dari pemerintah pusat itu hingga mencapai 200 miliar tiap tahunnya dibandingkan dengan Kabupaten Labuhanbatu Induk. Tetapi pandangan lain juga menyatakan bahwa pemekaran daerah tersebut cenderung di paksakan sebab manakala jika di ukur dari alat dan kelengkapan sebuah daerah otonomi baru belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana yang meskinnya.

Namun hal tersebut bukan berarti program untuk kebijakan pemekaran dihentikan. Solusi setiap persoalan tetap ada yaitu atas nama rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. *Kedua* angka peningkatan terhadap partisipasi sekolah semakin meningkat sebab program capaian pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat atau anak didik itu sangat tinggi kebijakan pemerintah untuk memperhatikan kondisi masyarakat untuk melanjutkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mendapat apresiasi dari kalangan masyarakat sekitar. *Ketiga*

Berdasarkan grafik di atas terlihat peningkatan IPM sejak tahun 2008 sebesar 72,08 menjadi 74,14 pada tahun 2011 dan meningkat lagi ditahun 2012 menjadi 74,92. Hal ini juga disertai dengan kenaikan peringkat IPM Kabupaten Labuhanbatu Utara menurut propinsi yang berada pada peringkat 17 di tahun 2010 menjadi peringkat 13 pada tahun 2012.

Daftar Rujukan

Buku

- Setiyono,Budi. (2007) *Pemerintah Dan Menejemen Sektor Publik*. Penerbit; jl.mampang prampataanVI no.66 jakarta 12790 telpon/fax(0217993121).
- Sita Van Bemmelen Dan Remco Raben. (2011).*Antara Dan Negara Indonesia Tahun 1950-An*. penerbitKLTV-jkt-NIOD-yayasan pustaka obor indonesia. Hal.133.
- Romli, lili. (2007). *Potret otonopmi daerah dan wakil rakyat di tingkat lokal*. Penerbit, pustaka pelajar celean timur UH III/548 yogyakarta 55167 hal. 4
- Ermaya suradinata, 2002. *Menajemen pemerintahan dalam ilmu pemerintahan*. Diterbitkan oleh pt. vidcodata-jakarta hal-50
- Nurcholis, hanif,2005. *Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah* penerbit: PT. Grasindo, jl. Palmerah selatan 22-28, jkt 10270
- Mansur fakih, 2001. *Runtuhnya teori pembangunan dan glonalisasi*. Penerbit. INSISTPRESS pustaka pelajar, jl. Celeban timur UH III/548 Yogyakarta 55167.
- Noor, Isran, 2012. *Politik daerah untuk penguatan NKRI desain dan produksi profajar* jurnalsm edisi pertama september 2012.
- Caporaso james, 2008. *Teori-teori ekonomi politik*. Penerbit pustaka pelajar celean timur UH/III/548 yogyakarta 55167
- Nazir, moh. (2003). *Metode Penelitian*. Penerbit ghalia indonesia, jl, mesjid alhidayah No. 5, pejaten barat jakarta 12510

- Nawawi, ismail. 2009. *Public policy*. Analisis, strategi advokasi teori dan praktek. Penerbit PNM, Surabaya
- Puspitosari hesti, 2011. *Filosofi pelayanan public*. Penerbit setara pressjl. Joyosuko metro 42 malang, jatim
- Emilia, Emi. 2008. *Menulis tesis dan disertasi*. Penerbit: alfabeta, bandung, hal: 209-210
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy teori kebijakan –analisis kebijakan-proses kebijakan perumusan, implementasi, evaluasi, revisi risk management dalam kebijakan public kebijakan sebagai the fifth estate metode penelitian kebijakan*. penerbit: PT. Elex Media Komputindo Cetakan: Oleh Percetakan Pt. Gramedia, Jakarta 2009.
- Nugroho Riant, 2000. *Otonomi dentralisasi tanpa revolusi. kajian dan Kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia*. Penerbit:PT. Alex media Komputindo kelompok gramedia-jakarta 2000.
- Kushandajani, 2011. *Makna otonomi daerah diwilayah laut bagi masyarakat pesisir*. Penerbit; Fisip Indip Jl. Prof. H. Sudharto-Tembalang , Telp: (024)7465405.
- Ratnawati, tri. *Pemekaran Daerah Politik Lokal Dan Beberapa Isu Terseleksi*. Penerbit: Pustaka Pelajar Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167 Cetakan: Pertama, Februari 2009.
- Paul J. Gertler. 2011. *Impact Evaluation in Practice*. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street NW Washington DC 20433 Telephone: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org
- Subarsono.AG. *anlisis kebijakan public, konsep, teori, dan aplikasi*. Penerbit. Pustaka pelajar 2005. Jl. Celebon timur UH III/548 yoyakarta 55167.
- BRIDGE. (2008). *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Jakarta: BRIDGE.
- Sjafrizal, 2014. *Perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi*. Penerbit. PT. Rajagrafindo persada. Jl. Raya leuwinanggung, kec. Tapos depok 16956.

Dokumentasi:

- Bps Labuhanbatu dalam angka 2006
- Bps Labuhanbatu dalam angka 2007
- Bps Labuhanbatu dalam angka 2008
- Bps Labuhanbatu dalam angka 2009
- Bps Labuhanbatu dalam angka 2010
- Bps Labuhanbatu dalam angka 2011
- Bps Labuhanbatu dalam angka 2012
- Bps Labuhanbatu dalam angka 2013
- Bps Labuhanbatu dalam angka 2014
- Bps labuhanbatu utara dalam angka 2008
- Bps labuhanbatu utara dalam angka 2009
- Bps labuhanbatu utara dalam angka 2010
- Bps labuhanbatu utara dalam angka 2011
- Bps labuhanbatu utara dalam angka 2012
- Bps labuhanbatu utara dalam angka 2013

Internet:

www.id.wikipedia.org/wiki/Desentralisasi
www.geografi.ui.ac.id/portal/sivitas-geografi/dosen/makalah-seminar/496-2/

